

BAB III

ANALISIS KOMPARATIF KARAKTERISTIK GAGASAN *DYNAMIC EQUILIBRIUM* DAN *ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC*

Continuity and change dalam kebijakan luar negeri Indonesia membawa penulis pada pemikiran bahwa ada persamaan serta perbedaan karakteristik di antara *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Keduanya merupakan kontribusi besar dari Indonesia untuk dunia. Strategi geopolitik ini sama-sama memiliki dampak yang penting bagi kawasan Indo-Pasifik. Pada bab sebelumnya, kita dapat melihat bahwa Presiden SBY dan Presiden Jokowi menganggap ASEAN sebagai entitas penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Meski demikian, kedua presiden memandang ASEAN secara berbeda. Hal ini bermuara pada perbedaan *output* atau luaran kedua gagasan. *Dynamic Equilibrium* dan AOIP adalah gagasan yang mempermudah kita untuk memahami bagaimana cara Indonesia melihat dan akhirnya "meletakkan" ASEAN dalam strategi politik luar negeri. Ide-ide besar ini pun menjadi pijakan penting bagi Indonesia dalam mengembangkan kawasan, melebarkan ruang kerja ASEAN, serta menunjukkan pengaruhnya di lingkup global.

Di samping karakteristik yang khas, kedua gagasan juga memperkuat dan memperkaya teori liberalisme institusionalis. Baik *Dynamic Equilibrium* maupun *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* memiliki konsistensi dengan konsep kunci teori ini, yaitu konsep rezim internasional. Rezim sendiri memiliki fungsi untuk mengatur kerja sama di tengah sistem dunia yang anarki. Sehingga, perdamaian

dapat terwujud meski di tengah kondisi dunia yang tidak menentu. Di samping itu, masih ada poin-poin lain yang dapat menjadi bukti kedekatan antara kebijakan luar negeri Indonesia dengan teori ini.

Atas dasar tersebut, bab tiga dirancang untuk menguraikan perbandingan karakteristik antara *Dynamic Equilibrium* dan AOIP serta membuktikan bahwa keduanya mengandung spirit liberalisme institusionalis. Bab ini terbagi dalam empat buah sub-bab. Sub-bab pertama membahas Perbedaan Karakteristik Gagasan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Penulis akan menguraikan karakteristik berbeda dari kedua gagasan berdasarkan beberapa komponen, yakni Prinsip-Prinsip Gagasan, *Output* atau Luaran Gagasan, dan Pandangan Gagasan terhadap Kawasan Indo-Pasifik. Sub-bab kedua berisi Persamaan Karakteristik Gagasan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Sub ini akan terdiri atas Peran Sentral ASEAN di dalam Gagasan dan Orientasi Gagasan. Sub-bab ketiga adalah Konsistensi Gagasan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dengan Spirit Teori Liberalisme Institusionalis. Sub ketiga menjabarkan Konsistensi Gagasan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dengan Konsep Rezim Internasional, ASEAN sebagai Aktor Non-Negara yang Memimpin Kerja Sama Kawasan, Penggunaan Dialog dalam Mekanisme Penyelesaian Konflik, Perkembangan Ekonomi. Terakhir, sub-bab keempat berisi kesimpulan dari hasil analisis.

1.1 Perbedaan Karakteristik Gagasan *Dynamic Equilibrium* dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

1.1.1 Prinsip-Prinsip Gagasan

Secara umum, kedua gagasan ini lahir untuk membangun arsitektur Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan inklusif. *Dynamic Equilibrium* dan AOIP pun memiliki prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan kerja sama kawasan. Meskipun tujuan penggagasan kedua kebijakan ini serupa, tetapi terdapat perbedaan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Salah satu perbedaan yang cukup signifikan dapat dilihat melalui kuantitas butir prinsip-prinsip gagasan.

Dynamic Equilibrium memiliki nilai atau prinsip yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan AOIP. Marty Natalegawa tidak secara eksplisit menyebutkan prinsip apa yang terdapat di dalam doktrin ini. Namun, secara umum ada 2 prinsip yang sering disinggung oleh Marty, yaitu persahabatan dan kerja sama. Menteri Marty menyampaikan bahwa “... *I am of the view that we should be ready to work towards an Indo-Pacific wide treaty of friendship and cooperation*” (CSIS, 2013). Kata “*friendship*” atau “persahabatan” mengacu pada hubungan baik ASEAN dengan negara-negara partner eksternal. Artinya, Indonesia ingin negara-negara anggota ASEAN melihat negara Indo-Pasifik sebagai teman yang tidak mengancam eksistensi entitas manapun. Begitupun sebaliknya, ASEAN ingin menghilangkan rasa curiga kepada entitas lain dengan bersahabat dengan mereka. Rasa “aman” inilah yang seringkali tercipta lewat hubungan persahabatan atau hubungan baik di antara para aktor. Ketika perasaan “aman” sudah tercipta, maka kerja sama akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

Lebih lanjut lagi, AOIP justru memiliki kuantitas prinsip-prinsip yang lebih banyak, yakni sebanyak 13 butir. Dikutip dari Dokumen Final *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (2019), nilai-nilai tersebut antara lain penguatan sentralitas ASEAN, keterbukaan, transparansi, inklusivitas, kerangka kerja sama berbasis aturan, *good governance*, menghargai kedaulatan, non-intervensi, komplementer terhadap kerangka kerja sama yang ada, kesetaraan, saling menghormati, saling percaya, serta penghormatan terhadap hukum internasional. AOIP telah melalui proses negosiasi yang panjang antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara anggota ASEAN. Jadi, wajar jika prinsip-prinsipnya terlihat lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan dengan Doktrin Natalegawa.

1.1.2 Luaran atau *Output* Gagasan

Dynamic Equilibrium sejatinya merupakan sebuah doktrin kebijakan luar negeri yang diluncurkan oleh Indonesia. Doktrin ini pun cukup berpengaruh di Asia Tenggara. Kenapa hanya sampai pada tingkatan doktrin? Ada dua alasan utama untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, gagasan ini belum melalui deliberalisasi oleh ASEAN. Yayan Mulyana, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, menjelaskan bahwa gagasan yang merupakan buah pemikiran dari Menlu Marty ini belum melalui tahap multi-interpretasi dari negara anggota ASEAN, maupun pihak lain (Mulyana, 2022). Pada dasarnya, konsep *Dynamic Equilibrium* merupakan kemauan politik (*political will*) suatu negara, dalam konteks ini adalah Indonesia. Pada saat doktrin ini lahir, Indonesia sedang memegang keketuaan di ASEAN. Indonesia ingin menguatkan kepemimpinannya dengan cara menjadikan doktrin

ketua sebagai doktrin regional (Jati, 2023). Alasan kedua, pencetus gagasan ini, yakni Marty Natalegawa, memiliki waktu yang sangat singkat untuk mengembangkan *Dynamic Equilibrium*. Marty harus mengakhiri masa jabatannya di tahun 2014. Rentang waktu sejak kemunculan ide *Dynamic Equilibrium*, di tahun 2011, tidak cukup panjang untuk pengimplementasian gagasan tersebut (Raharja, 2022). Itulah sebabnya gagasan Menteri Marty hanya sampai pada tingkat doktrin kebijakan luar negeri.

Pada periode selanjutnya, AOIP hadir sebagai kerangka kerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Dokumen ini terus dikembangkan dan direalisasikan melalui proyek-proyek kerja sama yang konkrit. Lantas, mengapa gagasan AOIP justru diterima oleh negara-negara kawasan dan diadopsi oleh ASEAN? Jawabannya adalah gagasan ini tidak menonjolkan peran salah satu negara tertentu (Jati, 2023). Penyusunan *Asean Outlook* juga sangat diplomatis karena telah melalui diskusi bersama para negara anggota ASEAN. Sehingga, AOIP jauh lebih akomodatif terhadap preferensi masing-masing negara Asia Tenggara. Pemerintahan Jokowi sudah menempuh jalan panjang hingga akhirnya ASEAN menerima konsep AOIP yang digagas oleh Indonesia.

Perbedaan luaran *Dynamic Equilibrium* dan AOIP telah disinggung dari bab pertama. Perbedaan ini sangat jelas dan menandakan adanya perbedaan karakteristik di antara kedua gagasan. Luaran kedua gagasan tersebut berbeda akibat proses pengumpulan ide yang menempuh jalan berbeda. AOIP dibentuk dengan melalui banyak diskusi, sedangkan doktrin Natalegawa cenderung hanya memasukkan sudut pandang Indonesia sebagai bagian dari kawasan. Meskipun

demikian, perbedaan luaran ini tidak lantas menghentikan langkah Indonesia dalam memajukan peran dan pengaruh ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.

1.1.3 Pandangan Gagasan terhadap Kawasan Indo-Pasifik

Kemunculan Indo-Pasifik menandakan transformasi geopolitik di kawasan yang dahulu disebut sebagai Asia Pasifik. Terminologi ini diperkenalkan oleh Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang, tahun 2007. Pada saat itu, Abe sedang berpidato di hadapan Parlemen India untuk menguraikan visinya tentang “pertemuan dua lautan” atau “*confluence of the two seas*” antara Hindia dan Pasifik (Sharma & Blaxland, 2022). Abe telah mengubah “Indo-Pasifik” dari slogan menjadi sebuah aspirasi, mendefinisikan arsitektur keamanan dan ekonomi, serta menjaga pemikiran dan perdagangan bebas di kawasan (Sharma M. , 2022). Kemudian, gagasan FOIP dipromosikan oleh Jepang di Washington pada tahun 2017 dan 2018 hingga Departemen Pertahanan AS mengubah nama komando militer senior kawasan dari Komando Pasifik menjadi Komando Indo-Pasifik (Sharma & Blaxland, 2022). Indo-Pasifik seolah-olah menjadi nama sebuah regional, bukan lagi dipandang sebagai sebuah strategi politik luar negeri.

Lebih jauh lagi, transformasi geopolitik juga membawa ketegangan bagi kawasan. Pergerakan aliansi AS di Pasifik sangat mengkhawatirkan bagi Cina. Sikap Cina juga tidak jauh berbeda dibanding rivalnya. Cina memberikan tantangan bagi Asia Tenggara, yakni mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonominya sambil menjaga kedaulatan dari bahaya ketergantungan yang berlebihan (Strangio, 2020, hal. 56). Namun, menurut Rizal Sukma (2019),

pergantian (*shifting*) geopolitik dan geoekonomi dunia ternyata dapat melahirkan tiga buah perkembangan bagi kawasan, yakni permainan politik *great powers / major powers* kembali ke Asia Tenggara, masa depan Asia Tenggara bergantung kepada kekuatan-keuatan eksternal-regional yang saling berinteraksi, serta kunci dari para kekuatan eksternal-regional dimulai dari formulasi dan promosi visi tatanan regionalnya sendiri. Maka dari itu, ASEAN sebagai organisasi di kawasan Indo-Pasifik ikut terlibat dalam upaya meredam rivalitas ini. Lantas, bagaimana ASEAN harus memposisikan diri di kawasan?

Dynamic Equilibrium menjawab pertanyaan tersebut. Pertama-tama, ASEAN harus paham sejauh apa kapasitas mereka sebagai aktor di kawasan. Sebagian besar negara-negara anggota ASEAN juga tergolong dalam negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejak periode kedua presidensi SBY, para pembuat kebijakan Indonesia secara resmi mulai menggunakan istilah 'kekuatan menengah' sebagai status yang ingin dikejar oleh Indonesia (Karim, 2018, hal. 10). Jadi, secara politis ASEAN dapat dikategorikan sebagai aktor *middle power* atau kekuatan menengah. Marty menangkap kenyataan bahwa ASEAN sedang berada “di tengah-tengah” negara besar sehingga mengarahkan kekuatan Asia Tenggara untuk membentuk keseimbangan atau *equilibrium* di Indo-Pasifik (Raharja, 2022). Selanjutnya, secara geografis Asia Tenggara berada pada posisi silang dari negara-negara besar di dunia. Marty menyebut ini sebagai *triangular spanning two oceans* atau segitiga yang membentang di dua samudera (Natalegawa M. , 2013, hal. 1). Maksud Marty ialah Samudera Hindia dan Pasifik diapit oleh tiga kekuatan besar, yakni Jepang, Australia, dan India. Kemudian, posisi Indonesia berada di tengah-

tengah segitiga. Ini artinya, lalu lintas laut di dalam kawasan akan menjadi jalur sibuk dan krusial bagi perdagangan dunia. Geopolitik regional abad 21 memang ditandai dengan kebangkitan kekuatan maritim di Asia dan sekitarnya sehingga menjadikan laut kita sebagai *choke-point* (Scott, 2019, hal. 196). Domain maritim juga menjadi fokus yang semakin penting untuk alasan keamanan, ekonomi dan lingkungan (Anwar D. F., Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific, 2020, hal. 112). Maka, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan SBY menganggap bahwa Indo-Pasifik merupakan satu kawasan yang berkelanjutan.

Berbeda dari Doktrin Natalegawa, AOIP justru menganggap Indo-Pasifik terbentuk dari dua wilayah yang berbeda. AOIP menolak Indo-Pasifik sebagai ruang teritorial yang berkelanjutan, sebaliknya Indo-Pasifik terdiri dari dua wilayah yaitu Asia-Pasifik dan Samudera Hindia (Thu, 2020, hal. 56). Pertentangan ini juga sebagai sikap tegas ASEAN yang tidak ingin AS dan sekutu menjadikan kawasannya sebagai arena kompetisi. ASEAN memiliki tiga alasan ketika menolak FOIP. Pertama, terminologi Indo-Pasifik masih sangat ambigu pada masa itu, sehingga ASEAN tidak ingin menandatangani atau menyetujui perjanjian apapun yang belum mereka pahami secara jelas. Kedua, ASEAN takut dianggap memusuhi Cina. Dokumen FOIP memang terlihat sangat ‘menyentil’ eksistensi Cina di kawasan. Maka dari itu, ASEAN tidak ingin memperkeruh situasi di antara Cina dengan AS dan sekutunya. Terakhir, ASEAN yang terdiri dari berbagai negara membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk berdiskusi dan mengambil posisi terhadap dinamika kawasan (Thu, 2019). Secara implisit, Strategi FOIP ditujukan untuk menahan kemampuan Beijing dalam mendominasi Asia (Strangio, 2020, hal.

50). Jose Antonio Morato Tavares, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, juga mengatakan bahwa proposal Indo-Pasifik Indonesia berbicara soal pendekatan lunak dan orang ke orang”, sedangkan Amerika Serikat dan Jepang berbicara tentang kekuatan militer (Scott, 2019, hal. 207). AOIP di era Jokowi berusaha berdiri pada 2 kaki, menolak FOIP dan memodifikasi konsep tersebut hingga sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh anggota ASEAN.

1.2 Persamaan Karakteristik Gagasan *Dynamic Equilibrium* dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

1.2.1 Peran Sentral ASEAN di dalam Gagasan

Pertama-tama, kita harus paham bahwa sentralitas ASEAN memiliki banyak penafsiran. Menurut Indraswari (2022), sentralitas dapat dipahami melalui tiga hal. Pertama, sentralitas memiliki dua tujuan utama yakni strategis dan normatif. Tujuan strategis membuat ASEAN menjadi inti di dalam tatanan regional. Sehingga preferensi ASEAN dapat terjaga. Sedangkan, tujuan normatif menghendaki posisi ASEAN sebagai platform yang netral dan aman dalam menegosiasikan tatanan regional. Kedua, sentralitas ASEAN diperdebatkan tentang kepemimpinannya. Kepemimpinan dapat dihasilkan melalui kekuatan sosial. Artinya, ASEAN sebagai simpul penting dalam struktur sosial dapat melakukan banyak hal untuk kawasan. Ketiga, sentralitas digambarkan sebagai hubungan ASEAN *vis a vis* kekuatan eksternal besar. Maksudnya adalah dalam menghadapi kekuatan besar yang berkumpul di kawasan, negara-negara Asia Tenggara secara kolektif menghimpun kekuatan sebagai sebuah organisasi regional untuk menghadapi tekanan eksternal.

Ketiga hal ini dipegang teguh oleh pemerintah Indonesia dalam memproduksi sejumlah strategi geopolitik.

Dynamic Equilibrium mengandung semangat regionalisme yang tinggi. Marty menyadari bahwa kawasan Asia Tenggara dan Pasifik memiliki pola kebangkitan serta situasi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Maka, ia melihat adanya peluang bagi kemunculan aktor organisasi internasional untuk menjadi *driving force* kerja sama kawasan. Kemudian, saat Indonesia menjadi ketua ASEAN, Menteri Marty berinisiatif untuk mempertegas kepada dunia bagaimana cara ASEAN memandang Indo-Pasifik. Dalam upaya mempertahankan sentralitasnya, ASEAN ditantang bukan hanya dengan menyediakan tempat bagi aktor lain tetapi dapat bertindak sebagai penyelenggara, pemimpin, atau penggerak proses negosiasi dalam forum regional (Mueller, 2019, hal. 181). Di samping itu, Doktrin Natalegawa menempatkan ASEAN sebagai aktor utama dalam kerja sama pembangunan arsitektur kawasan.

Semula, banyak penelitian yang menganggap bahwa Jokowi telah melakukan redefinisi lingkaran konsentris Indonesia. Namun, belakangan ini Jokowi kembali memainkan gaya kebijakan luar negeri sebagai pemimpin ASEAN melalui AOIP. Alih-alih meninggalkan ASEAN, Jokowi justru mengintegrasikan ASEAN dengan konsep Indo-Pasifik yang diartikan sebagai upaya Indonesia dalam mengajak ASEAN turut serta keluar dari lingkungan konsentris Asia Tenggara (Rosyidin M., 2019, hal. 79). Namun demikian, Indonesia tidak akan lepas kendali menjadi aktor dominan di kawasan. Sentralitas ASEAN masih dipertahankan dan menjadi hal

yang akan terus dijaga. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia juga mempertegas sentralitas ASEAN dengan pernyataan:

“Indonesia terus mendorong kerja sama konkrit yang inklusif dalam implementasi AOIP. Implementasi AOIP harus diurus utamakan dalam semua kegiatan ASEAN. Dalam konteks inilah, atas inisiatif Indonesia, telah disepakati *ASEAN leaders declaration on mainstreaming 4 priority areas on AOIP within ASEAN led-mechanism*” (Marsudi, 2023).

Hal ini justru menjadi pertanda bahwa Indonesia mampu membawa ASEAN untuk berpengaruh pada lingkaran yang lebih luar.

Sebenarnya, tidak ada yang melakukan redefinisi lingkaran konsentris Indonesia, baik SBY maupun Jokowi. Pada implementasinya, Indonesia dan negara-negara ASEAN lain memang masih belum memprioritaskan satu sama lain. Negara-negara ASEAN cenderung menjadikan ring-ring terluar sebagai mitra penting terutama dalam kerja sama ekonomi, seperti Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa (Raharja, 2022). Dewasa kini, Indonesia justru mengarahkan ASEAN untuk berfokus pada Indo-Pasifik yang menjadi lingkungan terdekatnya. Jadi, pembahasan mengenai lingkaran konsentris ini sebetulnya tidak terlalu krusial. Pada akhirnya Indonesia akan tetap memprioritaskan ASEAN dan ASEAN sudah seharusnya memprioritaskan Indo-Pasifik. Maka dari itu, *Dynamic Equilibrium* dan AOIP justru mempertegas konsentris Indonesia sekaligus ASEAN.

Pandangan lain soal posisi ASEAN di kawasan juga disampaikan oleh Yayan Ganda Hayat Mulyana. Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri ini menjelaskan bagaimana kedua gagasan menempatkan peran sentral ASEAN di

Indo-Pasifik. Menurut Yayan Mulyana (2022) *Dynamic Equilibrium* menganggap ASEAN sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang ‘menyerap’ dominasi salah satu negara dalam rangka menciptakan dan menjaga rasa saling percaya dari berbagai pihak yang terlibat. Sedangkan, AOIP menganggap ASEAN sebagai bagian dari kawasan Indo-Pasifik dalam pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak/mekanisme lain dan dalam rangka mentransformasi kompetisi menjadi kolaborasi. Jadi, kedua gagasan memiliki tujuan yang serupa meskipun menempuh jalan yang sedikit berbeda.

Indonesia masih meletakkan ASEAN sebagai sentral kebijakan luar negerinya terhadap Indo-Pasifik. Tantangan bagi ASEAN pada pergantian dekade ini tetap pada bagaimana mempertahankan posisi sentralnya secara historis terhadap perubahan lingkungan eksternal (Mueller, 2019, hal. 178). Namun, baik kebijakan Retno Marsudi maupun Marty Natalegawa sama-sama mengarahkan ASEAN untuk menjadi aktor penting di kawasan. Marty bahkan mengapresiasi pemikiran dan hasil kerja Menteri Retno dalam pembangunan arsitektur Indo-Pasifik. Menurut Marty, idealisme yang dipegang oleh Konsep Indo-Pasifik akan membuat ASEAN memainkan peran sentral, bukan mengangkat Indonesia atau negara anggota lainnya secara khusus (Cook, 2018). Indonesia perlu mengintensifkan upaya penguatan ASEAN agar sentralitas dan relevansi ASEAN tidak luntur di tengah transformasi strategis di kawasan (Sukma, 2019). ASEAN merupakan modal strategis utama bagi kebijakan luar negeri Indonesia.

1.2.2 Orientasi Gagasan

Secara umum, kedua gagasan sama-sama bertujuan membawa ASEAN untuk memiliki *stand point* terhadap dinamika yang terjadi di Indo-Pasifik. Posisi ASEAN juga sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yakni sebagai *middle power*. Secara umum, aktor berkekuatan menengah memiliki orientasi pada perdamaian. ASEAN perlu memiliki *stand point* dimana organisasi ini dapat memantau situasi sekaligus mengarahkan kawasan untuk mencapai kerja sama. Dengan begitu, perdamaian akan tercapai dan stabilitas kawasan dapat terjaga.

Doktrin Natalegawa berusaha mendorong ASEAN untuk membangun arsitektur regional yang inklusif. Tujuan doktrin keseimbangan dinamis adalah melibatkan semua kekuatan utama relevan di dalam kerangka kerja yang lebih kooperatif (Choir, William, & Zahirah, 2018, hal. 131). Doktrin Natalegawa juga menyiratkan sikap proaktif Indonesia di ranah regional maupun internasional. Kebijakan Dynamic Equilibrium SBY dan Marty mampu merespon kebangkitan Cina dengan sangat baik melalui masuknya kekuatan besar lain selain China dalam forum dan organisasi sentralisasi ASEAN, setara menuju keseimbangan kekuatan di kawasan (tidak ada negara yang mendominasi) (Putra, 2015, hal. 195). Sangat disayangkan, implementasi dari kebijakan ini tidak maksimal karena berakhirnya masa jabatan SBY dan Marty.

Di periode lain, kemunculan AOIP dianggap sebagai sikap reaktif kebijakan luar negeri Indonesia terhadap rivalitas di kawasan. Dalam konteks rivalitas adidaya, AOIP adalah respon terhadap tantangan yang berkembang dan berasal dari tekanan eksternal yang mungkin mengancam persatuan, melemahkan relevansi, dan menggerogoti sentralitas ASEAN (Sukma, 2019, hal. 3). Meskipun demikian, tidak

dapat dipungkiri bahwa gagasan ini turut mendorong ASEAN sebagai pemimpin kerja sama di kawasan. AOIP “memperbaharui” mekanisme ASEAN. Tidak serta merta menghilangkan nilai, norma, dan mekanisme ASEAN, AOIP justru hasil dari pengembangan mekanisme ASEAN yang telah ada sejak puluhan tahun silam. AOIP didesain untuk membuat Mekanisme ASEAN lebih relevan untuk digunakan pada jangkauan wilayah yang lebih luas seperti Indo-Pasifik. Pada dasarnya, kerja sama AOIP memang menggunakan pendekatan dua blok, yaitu memperkuat *ASEAN Led-Mechanism* serta menghubungkan mekanisme tersebut dengan mekanisme regional non-ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.

Namun, AOIP sering dikritik karna menyiratkan semangat multilateralisme yang menurun. Jokowi seolah buta akan tindakan yang harus diambilnya untuk menanggapi kebangkitan China, ia tidak yakin apakah kebijakannya akan tetap berbasis Sentralitas ASEAN atau tidak (Putra, 2015, hal. 195). Sebenarnya, pemerintahan Jokowi masih dilema terkait bagaimana harus menempatkan organisasi ini dalam mencapai preferensi nasional. Selama tahun-tahun awal kepresidenan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia sangat bersifat transaksional dengan fokus utama pada hubungan bilateral utama, bukan pada peran kepemimpinan dalam ASEAN (Anwar D. F., 2020, hal. 124). Padahal sudah jelas bahwa ASEAN merupakan ‘permainan khas’ bagi politik luar negeri Indonesia.

Namun, akhir-akhir ini Jokowi kembali mengarahkan kebijakannya pada ASEAN. Indonesia mengambil banyak keuntungan ekonomi dengan memainkan peran kepemimpinan di ASEAN. Sejak awal terbentuk, ASEAN memang sudah mengutamakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Asia Tenggara (Keling

et. al, 2011, hal. 172). Kemudian, barulah diikuti dengan pembangunan sosial, budaya, dan berbagai bidang lain. Misalnya saja dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Indonesia mengusung tema “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*” yang dengan jelas menggambarkan kepentingan ekonomi Indonesia dibalik kepemimpinannya di ASEAN. Menlu Retno menyatakan bahwa:

“Indonesia akan terus menekankan bahwa Indo-Pasifik harus didekati tidak saja dari aspek *security* namun juga dari aspek pembangunan ekonomi secara inklusif... Indonesia akan menyelenggarakan *flagship event*... yaitu *ASEAN Indo-Pacific Forum* dengan fokus pada beberapa kegiatan, yaitu *Creative Economy, Youth Conference on Digital Economy for SDG’s, Infrastructure Forum, and Business and Investment Summit*” (Marsudi, 2023).

Hal ini juga digambarkan secara jelas pada tampilan grafis dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2023.



Gambar 3. 1 Tampilan Grafis pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2023

Sumber: PPTM Kemlu, 2023

Tampilan grafis di atas memperlihatkan seolah-olah kapal kargo berada di depan kapal perang. Gambar tersebut mengimplikasikan bahwa Indonesia mengedepankan kerja sama ekonomi dibanding kerja sama lain. Keamanan kawasan, dalam konteks kekuatan militer, akan tetap diperhatikan oleh Indonesia. Namun, perekonomian adalah fokus utama dalam kegiatan kerja sama yang diprakarsai oleh Indonesia maupun ASEAN.

Sebenarnya, alasan Indonesia untuk memprioritas kerja sama ekonomi sudah logis. Dr. Siswo Pramono, dalam wawancara bersama FPCI, menjelaskan “... ada lebih banyak perusahaan internasional yang masuk karena mereka percaya bahwa regional ASEAN adalah wilayah yang stabil dan tidak akan ada perang di ASEAN ataupun wilayah sekitarnya yang lebih luas, seperti Asia Timur” (Pramono, 2021, hal. 7). Dari penjelasan tersebut, pengalaman Indonesia beberapa tahun ke belakang membawa para pembuat kebijakan pada titik optimisme tinggi terhadap pengembangan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dari narasumber Dinna Raharja yang mengatakan bahwa Indonesia berupaya menawarkan menu kerja sama ekonomi kepada negara-negara mitra (Raharja, 2022). Selain itu, Menteri Retno dalam pertemuannya dengan Ceko dalam rangka promosi Konsep Indo-Pasifik juga menyuguhkan menu-menu kerja sama ekonomi. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek kerja sama di Indo-Pasifik, yakni tantangan dan potensi Indo-Pasifik, sinergi berbagi strategi Indo-Pasifik, arsitektur keamanan Indo-Pasifik, ketahanan ekonomi, menghubungkan kawasan Indo-

Pasifik secara berkelanjutan, serta kepentingan usaha di Indo-Pasifik (Marsudi, 2022, hal. 1).

Dalam kesempatan lain, pemerintahan Jokowi mulai melakukan “*re-branding*” terhadap sikap kebijakan luar negeri Indonesia. Alih-alih mengamini AOIP sebagai respon reaktif dari dinamika kawasan, ASEAN justru mendeklarasikan bahwa dirinya berusaha menjadi aktor yang proaktif di bawah naungan AOIP. Hal ini ditegaskan melalui *ASEAN Leader’s Declaration on Mainstreaming Four Priority Areas of The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific within ASEAN-Led Mechanism* bahwa “... sentralitas dan persatuan ASEAN dalam arsitektur kawasan yang terus berkembang, dan kebutuhan ASEAN untuk mengambil peran proaktif...” (ASEAN, 2022). Namun, pembuktian dari pernyataan ini masih memerlukan banyak waktu.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, kedua gagasan konsisten untuk melindungi preferensi Indonesia di kawasan sambil mendorong pengaruh ASEAN pada jangkauan yang lebih luas. Pemerintahan Jokowi tidak secara eksplisit menampilkan diri sebagai aktor besar, melainkan menggunakan ASEAN sebagai komponen penting dalam meluncurkan strategi politik. Sebagai negara *middle power*, Indonesia sadar betul bahwa tindakan inklusif yang sangat mengandalkan partisipasi dari *major relevance power* dapat menjadikan Indonesia sebagai mitra netral yang dipercaya (Choir, William, & Zahirah, 2018, hal. 131). Langkah Indonesia ini sudah tepat. Di samping itu, ASEAN juga turut mendapat dukungan dari kekuatan regional yang menganggap pengaturan berbasis aturan (*rule based*) dan sentralitas ASEAN berguna untuk menyelenggarakan dialog serta interaksi

kawasan (Tan, 2015). Dengan cara ini, Indonesia dan ASEAN akan dilihat sebagai mitra strategis yang kooperatif sehingga kerja sama di kawasan dapat terus terwujud.

1.3 Konsistensi Gagasan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dengan Spirit Teori Liberalisme Institusionalis

Abad ke-21 menjadi salah satu periode paling bersejarah bagi geopolitik dunia. Pergeseran (*shifting*) kekuatan dunia, dari Barat ke Timur, memicu perubahan secara signifikan selama 2 dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi Cina yang tidak terbendung membuat AS menaruh atensi lebih kepada kawasan Asia Pasifik. Setelah ditelisik lebih dalam, permasalahan di antara keduanya bukan hanya soal perekonomian melainkan juga soal pengaruh di kawasan. Berkat kekuatan ekonomi yang sangat besar, Cina juga dapat memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah dan membangun pangkalan militer pada saat yang bersamaan (Shinzo, 2022). Ini adalah pertanda bahwa rivalitas kawasan masih belum surut dalam jangka waktu dekat.

Kondisi tidak menentu ini semakin diperparah krisis ekonomi Trans Atlantik tahun 2008. Krisis ini telah mengubah tatanan politik dunia. Kebangkrutan *Lehman Brothers* di Barat menjadi salah satu faktor penting bagi turunnya perekonomian Barat. Penurunan belanja konsumen dan ekspor ke Amerika Serikat sangat mempengaruhi arus barang, manufaktur, dan pertumbuhan pekerjaan di Eropa dan Asia (Harvard Business School, 2022). Negara-negara di kawasan Atlantik yang kala itu memiliki banyak pengeluaran untuk mencapai kepentingan nasional mengalami kesulitan financial. Barat, terutama AS, terlalu gencar

‘membuang’ modal untuk peperangan di Timur Tengah. Masalah ini akhirnya tereskalasi menjadi krisis global sekaligus salah satu yang terburuk sepanjang sejarah. Barat dianggap *over budget* untuk peperangan di Timur Tengah karna keuntungan dari perang pun tidak seberapa dibanding sumber daya yang mereka keluarkan. Kondisi yang tidak menentu seperti ini menjadi mimpi buruk bagi semua entitas global.

Di bagian selatan bumi, negara-negara berkembang semakin pesat mengejar ketertinggalan mereka dalam berbagai hal. Aktor-aktor baru bermunculan dari Asia, baik dalam bentuk negara maupun instansi. Lambat laun, kejayaan bangsa Barat mulai mengalami kemunduran dan poros peradaban bergeser ke Timur. Kebangkitan Cina di bidang ekonomi menjadi fenomena tersendiri di kawasan Asia Pasifik, karena dari perekonomian yang kuat, Cina dapat meningkatkan kekuatan militernya di Asia Pasifik (Purnama, 2017, hal. 87). Kebangkitan Cina adalah kebangkitan Asia. Pada akhirnya, Cina pun menjelma sebagai negara adidaya dan mengkhawatirkan bagi AS.

Relasi negara-negara adidaya (*great powers*), antara AS dan Cina, terbilang sangat fluktuatif. Rasa curiga di antara kedua negara ini mewarnai politik dunia setiap hari. Mereka memiliki berbagai cara untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan. Contohnya seperti pertemuan negara-negara Quad (*Quadrilateral Security Dialogue*) pada bulan Mei 2022 yang lalu. AS, Jepang, Korea Selatan, serta India melakukan pertemuan untuk memperkuat "tatanan internasional yang bebas" di Indo-Pasifik (Arbar, 2022). Wang Yi, menteri luar negeri Cina, tidak segan memberi peringatan terhadap rencana tersebut. Wang menganggap kelompok

Quad sebagai “NATO di Indo-Pasifik”, menuduhnya “mendukung mentalitas Perang Dingin”, serta “memicu persaingan geopolitik yang lebih sengit” (Gan, 2022). Beijing pun dibuat waspada oleh eksistensi AS melalui kedua negara tetangganya, yakni Jepang dan Korea Selatan. Aksi dan reaksi di antara keduanya menyiratkan situasi persaingan yang diliputi rasa ketakutan. Situasi rumit semacam ini turut membuat kawasan Asia Pasifik dan Laut Hindia diliputi rasa tidak aman dan tidak menentu.

Liberalisme institusionalis sangat realistis dalam memandang fenomena rivalitas negara adidaya. Kaum institusionalis tidak mengelak pada fakta bahwa dunia itu anarki. Anarki diartikan sebagai kurangnya pemerintahan bersama dalam politik dunia, secara tetap, tetapi negara-negara memiliki pola interaksi serta cara terstruktur yang berbeda satu sama lain (Axelrod & Keohane, 1985, hal. 226). Dengan kata lain, negara-negara memiliki ‘aturan’ sendiri dalam tatanan internasional. Aturan, nilai, ataupun norma yang berbeda-beda ini menimbulkan perbedaan paham di antara para aktor negara. Sehingga, mereka dipandang sebagai entitas yang sulit diatur dan menimbulkan pola interaksi yang kacau.

Pada poin dimana anarkisme dunia tidak dapat dihindari lagi, dibutuhkan solusi konkrit daripada hanya terus menetap dalam bayangan pesimisme. Menurut kaum liberal, kerja sama diperlukan untuk mencapai perdamaian. Dua syarat utama agar kerja sama dapat berkembang adalah didasarkan pada timbal balik dan bayangan soal masa depan setelah kerja sama terlaksana (Axelrod, 1984, hal. 173). Maka dari itu, liberalisme selalu mengedepankan hubungan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Mereka menyebut ini sebagai *win-win solution*.

Namun, dalam struktur yang anarki, kerja sama hanya dapat tercapai jika masing-masing negara mampu menegosiasikan kepentingan dan nilai-nilai mereka pada titik tertentu. Sehingga, liberalisme institusional menawarkan jawaban berupa rezim internasional.

1.3.1 Konsistensi Gagasan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dengan Konsep Rezim Internasional

Rezim internasional berperan dengan cukup signifikan hingga hari ini. Menurut Levy, *et al* (1995) rezim internasional adalah institusi sosial yang terdiri dari prinsip, norma, aturan, prosedur, dan program yang disepakati yang mengatur interaksi para aktor di bidang tertentu. Selain itu, rezim internasional tidak menggantikan hubungan timbal balik para aktor tetapi justru memperkuat dan melembagakannya (Axelrod & Keohane, 1985, hal. 250). Dengan kata lain, kerja sama yang terjadi di antara para aktor adalah kerja sama berbasis aturan (*rule-based cooperation*). Rezim berusaha hadir untuk meredam gesekan kepentingan di antara negara-negara dalam lingkup kawasan maupun global. Rezim dan institusi memang menekankan penggunaan multilateralisme dan kerja sama untuk mendapatkan kepentingan negara (Devitt, 2011, hal. 2). Jadi, konsep ini didesain untuk mengikat negara-negara agar berkomitmen pada suatu preferensi tertentu. Ikatan yang terjalin di antara mereka akan menimbulkan rasa kepercayaan yang lebih antara satu sama lain. Rezim menyiratkan sebuah amanah agar negara-negara tidak saling mendominasi. Dengan kata lain, rezim internasional menginginkan pola hubungan yang tidak hierarkis. Sehingga, negara-negara merasa setara dan akan menciptakan perdamaian.

Kerja sama berbasis aturan ini dapat kita lihat jelas dalam gagasan *Dynamic Equilibrium* dan AOIP. Marty menyampaikan bahwa entitas kawasan perlu mempersiapkan diri untuk bekerja terhadap perluasan traktat persahabatan dan kerja sama Indo-Pasifik (CSIS, 2013). Traktat ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang dapat mendorong evolusi regional. Pada masa yang berbeda, AOIP lahir dan secara eksplisit juga menegaskan bahwa kerja sama berbasis aturan menjadi fokus ASEAN dalam menghadapi dinamika Indo-Pasifik. Hal ini dapat kita temui dalam beberapa bagian di dalam Dokumen Akhir *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Pertama, salah satu tujuan terbentuknya gagasan ini ialah berusaha menawarkan pandangan untuk memandu kerja sama di kawasan (ASEAN, 2019, hal. 2). Kedua, prinsip-prinsip yang melandasi kerja sama Indo-Pasifik harus berdasarkan kerangka kerja sama berbasis aturan (*rule-based framework*) (ASEAN, 2019, hal. 2). Kedua gagasan ternyata cukup konsisten untuk menghadirkan aturan untuk menyelenggarakan kerja sama kawasan meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda.

Namun, pola interaksi antar manusia dan antar negara sangat berbeda. Ditambah lagi, setiap negara merdeka memiliki kedaulatan. Prinsip berdaulat ini membuat negara-negara sulit untuk tunduk pada aturan apapun yang ada di dunia. Aktor-aktor internasional merupakan entitas yang sederajat. Sehingga, pada dasarnya, tidak ada hubungan hierarkis dalam tataran internasional. Oleh sebab itu, rezim internasional diciptakan berbeda dengan hukum domestik. Rezim lebih fleksibel, tidak hierarkis, dan tidak dapat benar-benar memaksa. Peneliti membedakan hukum keras dan hukum lunak dengan cara menegaskan bahwa

pelanggaran terhadap hukum menimbulkan konsekuensi hukum, sementara pelanggaran norma politik menimbulkan konsekuensi politik (Shelton, 2009, hal. 71). Perbandingan dua jenis hukum ini berada dalam konteks aturan untuk sekumpulan individu dalam sebuah negara dan aturan untuk negara-negara berdaulat yang ada di dunia. Sanksi yang dijatuhkan kepada “pelanggar” pun bukan berupa sanksi pidana, melainkan hanya sebatas sanksi sosial.

Meskipun demikian, rezim internasional mampu membuat negara-negara berada dalam suatu “tingkat kepatuhan”. Menurut Chayes (1993, hal. 90) ada beberapa situasi umum yang dapat menggerakkan kekuatan politik demi mencapai kepatuhan yang lebih besar. Situasi pertama adalah dimana negara-negara yang berkomitmen pada rezim perjanjian merasakan bahwa titik kritis sudah dekat, sehingga peningkatan kepatuhan diperlukan untuk mempertahankan rezim. Kedua, negara-negara yang memiliki komitmen tinggi pada kepatuhan mungkin berusaha untuk meningkatkan standar tersebut kepada negara lain. Terakhir, mengkampanyekan peningkatan tingkat kepatuhan pada rezim perjanjian yang akan segera ditinggalkan oleh negara bersangkutan. Dengan kata lain, negara atau aktor yang terlibat di dalam rezim memiliki kesadaran untuk patuh kepada rezim perjanjian internasional karena kondisi tertentu. Tingkat kepatuhan ini memiliki hubungan dekat dengan besaran kepentingan negara yang terlibat di dalam kerja sama. Terutama jika mengacu pada kepatuhan negara-negara besar seperti Cina, AS, beserta sekutunya. Negara-negara ini pasti akan sangat mempertimbangkan banyaknya keuntungan yang akan mereka dapatkan jika mereka patuh maupun tidak patuh terhadap seperangkat aturan atau norma. Selain itu, ketergantungan

yang tinggi juga memengaruhi sikap kooperatif negara-negara. Kebanyakan negara telah terikat satu sama lain di dalam sebuah skema internasional dan regional. Sehingga, mereka saling terhubung dan saling membutuhkan satu sama lain. Sistem internasional seperti ini di satu sisi membawa kerugian. Jika salah satu negara mengalami masalah, maka negara lain juga akan terkena imbasnya. Di sisi lain, keuntungan yang tinggi dapat tercapai karena masing-masing negara yang terikat ini dapat memenuhi kebutuhan domestiknya.

Baik *Dynamic Equilibrium* maupun AOIP sama-sama memberikan rekomendasi tindakan bagi negara-negara mitra. Keduanya tidak mengekang perilaku negara-negara kawasan, tetapi tidak juga membiarkan sebebas-bebasnya. Gagasan-gagasan ini pun lebih terdengar seperti seruan atau ajakan bagi aktor-aktor regional untuk dapat bekerja sama secara damai. *Dynamic Equilibrium* sendiri dicetuskan untuk mempromosikan rasa tanggung jawab bersama dalam usaha keras menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan (CSIS, 2013). Sejalan dengan gagasan Marty, AOIP pun menegaskan bahwa salah satu tujuan terbentuknya ide ini adalah mempromosikan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan dalam mengatasi tantangan bersama (ASEAN, 2019, hal. 2). Selain itu, AOIP juga dapat membantu menghasilkan momentum untuk membangun kepercayaan strategis dan kerja sama yang saling menguntungkan di kawasan ini. Dari keterangan-keterangan di atas, kita dapat melihat bahwa kedua kebijakan luar negeri ini mencoba membangun keteraturan melalui kesadaran dari negara-negara kawasan. Keduanya menyiratkan keinginan untuk dipatuhi tanpa harus menjadi kaku.

Rivalitas negara adidaya sejatinya bukan ajang bagi ASEAN untuk turut mempertontonkan kekuatan. Tantangan utama bagi Asia Tenggara adalah bagaimana cara memanfaatkan kekuatan besar untuk mencegah perang dan mempertahankan ketertiban selama mereka memiliki kesadaran untuk bersikap kooperatif. Menurut Goh (2014), kerjasama dan institusi multilateral dapat membantu untuk melegitimasi serta menjinakkan kekuatan yang tidak setara dengan cara melembagakan atau melanggengkan dominasi struktural kekuatan-kekuatan besar secara berkelanjutan serta mengikat semua anggota dengan menggunakan aturan dan ekspektasi perilaku normatif. Sehingga, rezim kawasan sangat diperlukan untuk dapat menjaga kawasan berada pada suasana yang kondusif. Dengan begitu, kepentingan negara-negara di kawasan akan tercapai tanpa harus menimbulkan konflik besar.

1.3.2 ASEAN sebagai Aktor Non-Negara yang Memimpin Kerja Sama Kawasan

Poros ketiga di Indo-Pasifik menjadi sebuah tanggungan yang berat bagi entitas manapun di kawasan. Poros ketiga tidak boleh memiliki kecenderungan ke AS maupun ke Cina, juga tidak boleh mengkonfrontasi dua negara adidaya ini. Dalam menangani situasi ini, liberalisme institusionalis merekomendasikan pembentukan institusi atau organisasi internasional. Institusi memfasilitasi kerja sama dan meliberalisasi dengan cara membangun ekspektasi timbal balik yang lebih stabil, meningkatkan transparansi, menurunkan biaya informasi, menyiapkan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan kesepakatan (Norkevičius, 2014, hal. 100). Kemunculan institusi internasional ataupun regional

juga dapat dianggap sebagai strategi mengurangi jumlah pemain. Taktik dekomposisi antar aktor terkadang dapat meningkatkan prospek kerja sama (Oye, 1984, hal. 21). Seiring berjalannya waktu, organisasi atau institusi internasional berperan dengan signifikan dalam hubungan internasional.

Oleh sebab itu, Indonesia terus mendorong ASEAN untuk menjadi poros ketiga kawasan. Sentralitas ASEAN memainkan peran utama dalam multilateralisme kawasan karena organisasi ini berkomitmen untuk menjadi tuan rumah dan menetapkan agenda untuk berbagai pertemuan yang mencakup negara-negara non-Asia Tenggara ketika membahas berbagai masalah (Ho, 2020). Ini adalah sebuah kemajuan yang sangat positif bagi Asia Tenggara. Peningkatan peran ASEAN mengimplikasikan bahwa organisasi ini telah memiliki sumber daya yang mumpuni untuk mengatur agenda kawasan.

Indonesia sangat antusias dalam menyokong perkembangan ASEAN di kawasan. Pada masa kepresidenan SBY, Indonesia selalu bertindak sebagai perwakilan dari Organisasi ASEAN di dalam forum G20. Kemudian, ASEAN mengusulkan pembentukan *contact group ASEAN G20* dalam rangka konsolidasi kepentingan negara-negara anggota ASEAN (Karim, 2018, hal. 11). Lalu, gagasan ini dibawah oleh Indonesia pada pembahasan Forum G20. Dunia berharap bahwa Indonesia dapat berperan sebagai pemimpin kawasan yang aktif dengan tetap menjaga pentingnya dan relevansi ASEAN dalam proses pembangunan kelembagaan di Asia Tenggara (Karim, 2018, hal. 11). Ini merupakan salah satu contoh konkrit antusiasme Indonesia. Tidak hanya melakukan *lip service*, tetapi juga menjembatani kedua organisasi internasional ini.

Dukungan terhadap ASEAN datang dari berbagai mitra kerja sama di lingkup Asia Tenggara maupun Indo-Pasifik. Contohnya seperti Thailand yang mendukung dan menyokong peran ASEAN sebagai aktor penting di Indo-Pasifik. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan, yang meminta negara-negara ASEAN memperkuat mekanisme kerja sama seperti ASEAN+3, KTT Asia Timur, Forum Regional ASEAN, dan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara untuk memastikan keberlanjutan di semua dimensi (Xinhua, 2019). Selanjutnya, dukungan eksternal datang dari negara-negara Quad yang menegaskan kembali dukungan besar untuk persatuan dan sentralitas ASEAN dan untuk implementasi praktis dokumen AOIP (White House, 2022). Dukungan ini merupakan pertanda bahwa mitra-mitra kerja sama ASEAN, baik internal maupun eksternal, menaruh kepercayaan lebih. Dengan begitu, krisis kepercayaan yang selama ini terjadi di kawasan akan kembali pulih seiring berjalannya waktu.

Sentralitas ASEAN telah dipertahankan, bukan hanya oleh negara-negara anggota melainkan oleh negara di luar ASEAN. AOIP dan Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat memiliki prinsip dasar yang relevan dalam mempromosikan arsitektur regional yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan, di mana ASEAN adalah pusatnya, bersama dengan mitra yang berbagi tujuan ini (ASEAN, 2022). Negara-negara besar menghargai dan berusaha konsisten terhadap peran ASEAN di Indo-Pasifik. Strategi Indonesia untuk menaruh ASEAN pada lini terdepan dalam melindungi preferensi negara-negara kawasan tampaknya sudah tepat untuk saat ini. Ini menunjukkan bahwa ASEAN mulai mendapat pengakuan sebagai organisasi yang mampu menciptakan tatanan kawasan damai.

1.3.3 Penggunaan Dialog dalam Mekanisme Penyelesaian Konflik

Diplomasi lunak (*soft diplomacy*) merupakan ciri khas umum yang ditonjolkan oleh liberalisme institusionalis. Menurut Axelrod, landasan terjalannya kerjasama bukan terletak pada kepercayaan, melainkan kelanggengan hubungan. Kondisi yang kondusif sangat diperlukan agar para aktor dapat bekerja sama satu sama lain melalui pembelajaran *trial-and-error* tentang saling menghargai, meniru kesuksesan aktor lain, atau bahkan menyeleksi strategi yang ingin diterapkan (Axelrod, 1984, hal. 182). Maka dari itu, aktor-aktor internasional dituntut untuk dapat berkonsentrasi pada cara-cara yang menghasilkan interaksi strategis sehingga dapat menghadirkan kerja sama di bidang hubungan internasional tertentu (Norkevičius, 2014, hal. 101). Kaum liberal institusional memang sangat menghindari cara-cara keras dalam menyelesaikan konflik.

Indonesia pun telah menerapkan diplomasi lunak, baik melalui dialog maupun negosiasi. Diplomasi ini erat kaitannya dengan kekuatan lunak (*soft power*). Kekuatan lunak menekankan pada pendekatan persetujuan yang membuat pihak lain melakukan apa yang kita inginkan bukan karena berada dalam tekanan, melainkan karena merasa sepaham dengan pemikiran atau tindakan kita (Rosyidin M. , 2014, hal. 7). Cara-cara damai seperti ini menjadi modal utama bagi Asia Tenggara. Negosiasi dianggap mampu untuk membuat negara-negara lebih “tenang” dalam memutuskan sesuatu. Duduk berdampingan sambil berdiskusi adalah gambaran kegiatan yang didambakan oleh para liberalis untuk menyelesaikan permasalahan.

Indonesia sebagai pemimpin organisasi regional telah bertahun-tahun menggunakan diplomasi lunak dalam menghadapi berbagai dilema kawasan. Menurut Sebastian (2012), Indonesia memiliki strategi diplomasi tersendiri. Pertama, menyadari kebutuhan negara-negara tetangga dalam memiliki struktur yang kredibel untuk berkonsultasi. Kedua, menginginkan peran *middle power* yang independen untuk menegaskan dirinya, baik secara regional maupun global. Ketiga, menegaskan pemikiran ASEAN tentang keamanan dalam menghadapi tantangan jangka panjang secara memadai, terutama untuk mengamankan lingkungan maritim. Dari pola yang dipaparkan oleh Sebastian, kita dapat melihat bahwa Indonesia menaruh banyak perhatian pada lingkungan strategisnya, terutama pada ASEAN. Strategi ini ternyata cukup efektif untuk menaikkan profil negara serta mendorong peran ASEAN pada cakupan yang lebih luas.

Dynamic Equilibrium sangat menekankan kerja sama berbasis diplomasi lunak. Beberapa forum diskusi, negosiasi, dan perjanjian kerja sama telah terlaksana. Hal ini juga telah disampaikan oleh Marty bahwa:

“... Maka dari itu, komunikasi harus didirikan... pembentukan garis komunikasi, terutama di tengah krisis, memiliki mengedepankan dialog dibandingkan konfrontasi. Bukanlah kelemahan atau persetujuan tanpa izin, melainkan lebih kepada menguraikan dan menyampaikan maksud, tanpa prasangka buruk dan mengorbankan prinsip... Modalitas Pasifik adalah untuk membangun rasa saling percaya dan kepercayaan diri” (Natalegawa M. , 2013).

Penekanan pada komunikasi mengindikasikan adanya corak liberalisme institusionalis dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Marty sangat optimis bahwa doktrin regional yang ia promosikan dapat mendorong negara-negara kawasan memiliki kesadaran bersama untuk mengedepankan kerja sama.

Di periode lain, dokumen AOIP telah membuat para pemimpin negara ASEAN mencapai sebuah hasil mufakat tentang proyek-proyek kerja sama di bawah kerangka AOIP. Proyek implementasi AOIP adalah proyek dan kegiatan yang diprakarsai oleh ASEAN, bersama ASEAN beserta mitra-mitra eksternal, bersama pihak berkepentingan di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia secara terbuka dan inklusif, atau telah disetujui oleh ASEAN (ASEAN, 2022). Pemerintahan Jokowi masih konsisten dalam mempromosikan AOIP. Bahkan di tengah Pandemi Covid-19, ASEAN tetap mengembangkan AOIP. Sebagaimana pernyataan Dr. Siswo bahwa pada akhir November 2021, ASEAN Japan Summit telah mendiskusikan soal kerja sama Indo-Pasifik (Pramono, 2021, hal. 2). Dialog dan kerja sama ekonomi ditekankan dalam hubungan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

Menlu Retno juga mempertegas komitmen Indonesia. Ia mengubah logika interaksi antar negara dari permainan *zero-sum* menjadi kerja sama yang saling menguntungkan, persaingan menjadi dialog dan kerja sama, serta defisit kepercayaan menjadi kepercayaan strategis (Kementerian Luar Negeri, 2022). Komitmen ini kembali dipertegas dalam ASEAN – U.S. Special Summit, 2022 yang tertulis “Menegaskan kembali lebih lanjut komitmen bersama kami untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, serta

penyelesaian perselisihan secara damai, termasuk penghormatan penuh terhadap proses hukum dan diplomatik, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, sesuai dengan hukum internasional” (ASEAN, 2022). Ini adalah sinyal baik bagi perdamaian regional dan global.

1.3.4 Perkembangan Ekonomi

Dalam mencapai perdamaian, kaum liberal meyakini bahwa kesejahteraan adalah kuncinya. Maka dari itu, negara yang memegang nilai-nilai liberalisme institusionalis sangat masif membentuk blok-blok perdagangan internasional. Pembangunan ekonomi diklaim selalu menjadi inti dalam sistem kepercayaan regionalisme karena menjadi sarana untuk pembangunan negara-bangsa, stabilitas, dan ketahanan regional (Jetschke, 2012, hal. 332). Klaim lain dari liberalisme institusionalis adalah penciptaan pasar yang terintegrasi secara global. Klaim ini didasari pada asumsi bahwa pasar dan prinsip-prinsip konsumeris dapat diterapkan secara universal karena menjadi kepentingan pribadi bagi semua manusia terlepas dari konteks sosial mereka (Steger & Roy, 2010, hal. 53). Indonesia bersama ASEAN pun menuruti resep tersebut. Asia Tenggara sangat terbuka terhadap perdagangan, investasi, maupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Tidak sampai disitu, saat ini ASEAN sudah sangat terbuka kepada aktor manapun yang ingin bekerja sama di dalam lingkup Asia Tenggara maupun Indo-Pasifik.

Dimulai dengan Inisiasi Cina untuk membangun AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*). Lembaga ini menjadi salah satu proyek yang paling menguntungkan bagi ASEAN. AIIB adalah sebuah bank pembangunan multilateral

atau *Multilateral Development Bank* (MDB) berbasis pengetahuan modern yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sektor produktif di kawasan (Fany, Arifianti, & Augusta, 2019, hal. 72). Menurut MOU, modal dasar bank adalah \$100 miliar dan diharapkan bank akan mendapatkan \$50 miliar sebagai modal awal (Hermawan, 2015, hal. 33). Setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Xi dalam kunjungan kenegaraan ke Beijing, Indonesia pun menandatangani MOU pada tanggal 25 November 2014.

Seiring dengan meningkatnya pengaruh Cina di kawasan, AS pun terus mendekati ASEAN. Semangat perdagangan terpancar melalui Pertemuan Khusus ASEAN – AS. Kedua pihak berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam mempromosikan perdagangan dan investasi serta memfasilitasi rantai pasokan global dan konektivitas regional yang mulus, termasuk untuk barang-barang penting seperti pasokan medis, obat-obatan, vaksin, makanan dan produk pertanian, komoditas, produk teknologi tinggi, dan lainnya. pasokan dan layanan penting, serta berkontribusi pada pemulihan dan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan (ASEAN, 2022). Intimasi di antara Asia Tenggara dan AS merupakan sebuah kemajuan besar, dimana Indonesia dan ASEAN ternyata memenuhi kapasitas untuk membangun kerja sama dengan lingkaran terluar dari konsentrisnya.

Selain itu, ASEAN juga dapat memanfaatkan kemitraan dengan forum lain dalam pengembangan ekonomi kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato, menyampaikan bahwa ASEAN perlu memanfaatkan pencapaian yang disepakati dalam G20 di bidang ketahanan pangan

dan energi, stabilitas keuangan dan, berpegang pada prinsip-prinsip ASEAN yang sangat menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi di ASEAN (Limanseto, 2023). G20 hanya salah satu mitra strategis ASEAN. Akan ada lebih banyak peluang yang tercipta jika negara-negara ASEAN mampu menjaga soliditas internal dan memainkan peran sentral di Indo-Pasifik.

Spirit perdagangan khas liberalisme institusionalis sangat lekat dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap ASEAN. Hal ini pun divalidasi oleh pernyataan Jokowi dalam *KTT ASEAN-Kanada Commemorative Summit*, Presiden menyampaikan bahwa ditengah dunia yang sedang tidak kondusif ini, justru menjadi lebih penting untuk mengisinya dengan kerja sama konkret yang saling menguntungkan (Moegiarso, 2022). Kata “menguntungkan” ini secara implisit mengacu pada keuntungan ekonomi. Sebab, sejak era SBY hingga Jokowi, keduanya konsisten untuk menggaungkan pembangunan dan pengembangan ekonomi kawasan. Bahkan kedua presiden pun meluncurkan banyak sekali inovasi kerja sama dalam bidang ekonomi.

Hal-hal di atas, didasari pada isi dari dokumen AOIP sendiri. Salah satu pilar yang menjadi prioritas kerja sama ASEAN bersama negara mitra ialah pilar kerja sama ekonomi. Dalam pilar ini, ASEAN menawarkan banyak daftar kerja sama ekonomi seperti kerja sama selatan-selatan, memfasilitasi perdagangan, infrastruktur, dan jasa logistik, ekonomi digital, kerja sama UMKM, memperdalam integrasi ekonomi, memastikan stabilitas dan ketahanan keuangan, memperkuat dan mempromosikan perdagangan dan investasi, bahkan hingga mempersiapkan

revolusi industri ke-4 (ASEAN, 2019, hal. 5). Inilah landasan kuatnya komitmen kerja sama ekonomi ASEAN di era Joko Widodo.

1.4 Kesimpulan

Setelah menjabarkan perbandingan karakteristik *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dalam sub-bab sebelumnya, penulis merangkum uraian panjang di atas dalam sub terakhir ini. Tabel berikut dibuat untuk mempermudah pemahaman pembaca terkait persamaan dan perbedaan karakteristik di antara *Dynamic Equilibrium* dan AOIP.

Tabel 3.1 Perbandingan Karakteristik *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*

Komponen	Dynamic Equilibrium	ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
Perbedaan Gagasan		
Prinsip-Prinsip Gagasan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dua butir. • Persahabatan dan kerja sama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tiga belas butir. • Penguatan sentralitas ASEAN, keterbukaan, transparansi, inklusivitas, kerangka kerja sama berbasis aturan, <i>good governance</i>, menghargai kedaulatan, non-intervensi, komplementer terhadap kerangka kerja sama yang ada,

		kesetaraan, saling menghormati, saling percaya, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Output Gagasan	<ul style="list-style-type: none"> • Doktrin kebijakan luar negeri. • Belum melalui multi-interpretasi dari negara-negara anggota ASEAN. • Cenderung memperlihatkan Indonesia sebagai aktor penting di kawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerja sama. • Melalui proses dialog dan negosiasi sebelum diadopsi oleh ASEAN. • Cenderung mendorong ASEAN sebagai aktor penting di kawasan meskipun tetap di bawah kepemimpinan <i>de facto</i> Indonesia.
Pandangan Gagasan terhadap Kawasan Indo-Pasifik	<ul style="list-style-type: none"> • Indo-Pasifik sebagai ruang teritori yang terhubung dan saling berkelanjutan. • <i>Triangular spanning two oceans</i> atau segitiga yang membentang di dua samudera. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indo-Pasifik sebagai dua teritorial yang terpisah, tetapi dapat terintegrasi. • Terdiri atas Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. • Posisi Asia Tenggara berada di tengah persimpangan kedua samudera.

	<ul style="list-style-type: none"> • Asia Tenggara berada di tengah-tengah tiga negara besar, yakni Cina, Australia, dan India. Ketiganya ini diibaratkan sebagai sudut-sudut dalam bidang segitiga. • Segitiga tersebut membentang di atas perairan Hindia dan Pasifik. 	
Persamaan Gagasan		
Peran Sentral ASEAN dalam Gagasan	<ul style="list-style-type: none"> • ASEAN sebagai sentral dari kerja sama dan aktivitas kawasan. • ASEAN sebagai <i>driving force</i> terjalannya kerja sama. • ASEAN sebagai <i>bridge builder</i> bagi 	<ul style="list-style-type: none"> • ASEAN menjadi sentral dari kerja sama dan aktivitas kawasan. • ASEAN sebagai <i>driving force</i> terjalannya kerja sama. • ASEAN sebagai <i>bridge builder</i> bagi negara-negara di kawasan. • Indonesia tidak melakukan redefinisi lingkaran konsentris kebijakan luar negeri.

	<p>negara-negara di kawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indonesia tidak melakukan redefinisi lingkaran konsentris kebijakan luar negeri. 	
Orientasi Gagasan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif. • Mengedepankan kerja sama ekonomi sebagai solusi bagi terwujudnya perdamaian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif. • Mengedepankan kerja sama ekonomi sebagai solusi bagi terwujudnya perdamaian.

Perbedaan kedua gagasan terletak pada komponen prinsip-prinsip gagasan, *output* atau luaran gagasan, dan pandangan gagasan terhadap kawasan Indo-Pasifik. Secara kuantitas prinsip, *Dynamic Equilibrium* memiliki jumlah yang lebih sedikit dan sederhana dibandingkan dengan AOIP. Kuantitas ini juga cukup menggambarkan bagaimana proses pembuatan kedua kebijakan berlangsung. AOIP memiliki banyak prinsip karna berusaha mengakomodir, secara langsung, kepentingan negara-negara anggota ASEAN. Sedangkan, *Dynamic Equilibrium* hanya menampung aspirasi pemerintah Indonesia yang ingin mendorong ASEAN

agar memiliki *stand point* terhadap isu-isu kawasan. Hal tersebut berimbas pada bentuk luaran kedua gagasan yang berbeda. Doktrin Natalegawa adalah doktrin ketua ASEAN yang didorong untuk menjadi doktrin kawasan. Doktrin ini sangat filosofis sehingga memakan waktu yang lama untuk dapat diimplementasikan. Berbeda dari gagasan sebelumnya, AOIP justru sangat pragmatis dan menekankan kerja sama konkrit yang dapat terwujud dalam jangka waktu dekat. Perbedaan terakhir adalah terkait sudut pandang gagasan terhadap kawasan yang disebut sebagai Indo-Pasifik. Doktrin Natalegawa menganggap wilayah ini adalah satu kesatuan dengan istilah *triangular spanning two oceans*. Sedangkan, AOIP menganggap Indo-Pasifik terdiri atas dua buah ruang teritori yang berbeda, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Lebih lanjut lagi, penulis juga mendeskripsikan dua komponen yang mengakomodir persamaan *Dynamic Equilibrium* dan AOIP. Persamaan pertama ditemukan dalam peran sentral ASEAN di dalam gagasan. Kedua gagasan ini menaruh ASEAN sebagai sentral dari seluruh aktivitas kerja sama di Indo-Pasifik. Artinya, Indonesia melalui Doktrin Natalegawa dan AOIP masih mempertahankan prioritas kebijakan luar negerinya untuk ASEAN. Persamaan kedua adalah orientasi gagasan. Kedua gagasan sama-sama memepatkan ASEAN sebagai aktor kekuatan menengah. Aktor kekuatan menengah memiliki orientasi pada perdamaian, dalam konteks ini megacu pada perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Tandanya, ASEAN harus memimpin dan menyediakan wadah kerja sama, bukan melakukan konfrontasi kekuatan terhadap negara-negara besar. Indonesia juga masih meresepkan kerja sama di bidang ekonomi sebagai solusi bagi perdamaian

kawasan. Maka dari itu, tidak heran jika banyak sekali “menu” kerja sama ekonomi yang diberikan kepada mitra ASEAN.

Pembahasan terakhir adalah mengenai konsistensi kedua gagasan dengan spirit liberalisme institusionalis. *Dynamic Equilibrium* dan AOIP dapat dikategorikan sebagai rezim internasional. Gagasan-gagasan ini telah memfasilitasi kerja sama di kawasan yang paling dinamis. Alasan pertama klaim ini adalah karena keduanya berisi pedoman dan menawarkan kerja sama berbasis aturan (*rule-based*). Alasan kedua adalah karena keduanya mendorong negara-negara agar patuh terhadap aturan kerja sama. Negara-negara digalakan untuk dapat memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian, kesejahteraan, dan inklusifitas Indo-Pasifik. Lebih lanjut lagi, Indonesia telah berhasil menyokong ASEAN untuk menghadapi rivalitas negara adidaya di Indo-Pasifik. Sokongan ini tidak hanya secara moril, tetapi juga diiringi oleh strategi kebijakan luar negeri yang kita kenal sebagai Doktrin Natalegawa serta AOIP. Kehadiran aktor non-negara dalam tatanan internasional merupakan salah satu komponen penting dari penerapan formula-formula liberalisme institusionalis dalam mencapai perdamaian. Hal ini juga didukung oleh komitmen dalam mengedepankan dialog dan negosiasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Tidak sampai disitu, kemajuan pasar bebas dan masifnya kerja sama di bidang ekonomi kawasan telah membuahkan perkembangan ekonomi bagi Asia Tenggara dan negara-negara lain di Indo-Pasifik. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* telah memperkaya dan memperkuat teori liberalisme institusionalis.